

BAB IV

BENTUK-BENTUK BANTUAN AMERIKA TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA

Masalah terorisme merupakan ancaman besar bagi keamanan Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah AS harus segera menemukan cara untuk mengatasi ancaman terorisme. Untuk menciptakan keamanan yang kondusif AS harus memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, yang merupakan masalah yang sangat vital bagi keamanan nasional AS. Masalah terorisme, sama pentingnya seperti masalah keamanan AS yang lainnya, seperti yang telah disebutkan dalam National Security Strategy (NSS) AS, baik itu masalah senjata pemusnah massal (WMD) serta Keamanan Nasional (Homeland Security). Sehingga untuk memerangi terorisme, pemerintah AS melakukan upaya-upaya untuk memenangi perang melawan terorisme. Seperti menciptakan strategi yang tepat untuk memenangi perang melawan terorisme tersebut.

Perang melawan terorisme yang diserukan AS tersebut, bukanlah hal yang sangat mudah. Walaupun saat ini, AS sebagai negara adidaya dengan kekuatan Militer yang tak dapat ditandingi oleh negara manapun. Untuk memenangi perang ini, AS menemukan strategi yang tepat dalam upaya untuk mengatasi segala ancaman.

Pasca tragedi 9/11, AS mengeluarkan kebijakan perang melawan terorisme dan mengajak negara di seluruh dunia untuk ikut dalam pemberantasan terorisme,

tidak terkecuali Indonesia. Pada 19 September 2001 selama pertemuan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Presiden George W. Bush, kedua kepala negara ini membahas perlunya kerjasama keamanan antara Indonesia dan AS yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dalam mendukung perdamaian, demokrasi, dan stabilitas. Hasil kesepakatan yang dicapai antar keduanya memutuskan bahwa akan diadakan Dialog Keamanan setiap tahunnya yang membicarakan tentang berbagai macam isu keamanan dan pertahanan baik keamanan nasional maupun keamanan regional, serta pemberantasan terorisme yang mengancam masyarakat internasional.

Dalam kerjasama bilateral pemerintah AS juga memberikan bantuan dalam rangka kerjasama kontra terorisme, pemerintah AS memberikan bantuan militernya melalui foreign military financing (FMF), international military and education training (IMET), expanded international military and education training (E-IMET), joint military exercise and other activities, dan regional defense counterterrorism fellowship program (CTFP).⁴⁴

Tragedi bom Bali 2002 yang merupakan serangan bom terdasyat pasca serangan 9/11, memaksa pemerintah Indonesia untuk merespon masalah terorisme. Perhatian pemerintah AS terhadap terorisme di Indonesia pun, semakin memaksa posisi Indonesia turut ke dalam kampanye perang terorisme AS. Pasca Bom Bali tersebut Pemerintah mulai merespon secara terbuka dan mulai ikut berperan dalam memerangi terorisme. Wujud perhatian Indonesia dalam pemberantasan terorisme yaitu menerima bantuan-bantuan dari berbagai negara

⁴⁴ www.etan.org/news/2007/milglosarybh.htm diakses 18 Mei 214

termasuk Amerika Serikat, bentuk-bentuk bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Dukungan Financial

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa selama ini Amerika ikut andil dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Lahirnya Densus 88 di Indonesia pun tidak lepas dari tangan Amerika. Densus 88 ini mendapat kucuran dana langsung dari AS melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security Service). Untuk mendukung operasional kerja anggota Densus 88, Detasemen ini dilengkapi dengan persenjataan lengkap dari AS, seperti senapan serbu Colt M4, senapan serbu Steyr AUG, HK MP5, senapan penembak jitu Armalite AR-10, dan Shoghun Remington 870, bahkan dikabarkan satuan ini memiliki pesawat C-130 Hercules sendiri untuk meningkatkan mobilitasnya. Detasemen yang dibentuk pada 30 Juni 2003 ini masuk dalam paket proyek Amerika bagi Indonesia yakni JCLEC (Jakarta Centre for Low Enforcement Cooperation), dimana Australia juga ikut di dalamnya.

Sejak tahun 2002, anggaran untuk *National Security Agency* dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) AS meningkat sebanyak lebih dari 60 persen menjadi sebanyak US\$ 36,2 triliun untuk tahun anggaran 2004.⁴⁵ Pada tahun 2005, anggaran DHS meningkat kembali sebesar 10 persen menjadi US\$ 40,2 Triliun. Lebih dari 60 persen anggaran DHS digunakan untuk mencegah terorisme di dalam negeri AS. Anggaran pencegahan

⁴⁵ Protecting the Homeland Post September 11, Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1158339830666.shtm diakses 22 April 2015

lainnya termasuk meningkatkan kemampuan intelijen, menyusuri aset-aset milik teroris, dan membangun jaringan kerjasama dengan negara-negara lain.

Dalam situs World Policy Institut dimuat sebuah laporan mengenai bantuan AS ke Negara-Negara Asing paska peristiwa 11 September (U.S. Military Aid and Arms Transfers Since September 11), Indonesia tepat berada dibawah India dan Pakistan sebagai negara penerima suntikan dana dari AS.

Menurut sumber World Policy Institut, Indonesia tahun 2006 mendapat kenaikan bantuan dari program IMET (International Military and Education Training) sebanyak 800.000 dolar AS yang pada tahun 2004 Indonesia hanya mendapat bantuan sebesar 459.000 dolar AS dan Indonesia menerima bantuan 70 juta dolar AS dari Dana Bantuan Ekonomi, dan 6 juta dolar AS untuk dana anti-terorisme sebagai dana awal dari 12 juta dolar AS.⁴⁶

Sementara sumber East Timur, menyebut Lembaga-lembaga AS yang memberikan bantuan dana Asing dengan program pemberantasan terorisme, lembaga tersebut antara lain: Regional Defence Counterterrorism Fellowship Program/Regional Defense Combating Terrorism Program (CTFP/Program Mememerangi Terorisme dan Pertahanan Regional). Lembaga ini memberikan bantuan dari tahun 2002 sampai dengan 2004, Indonesia telah menerima dana CTFP dalam jumlah melebihi Negara-negara penerima lainnya dan dua kali lebih besar daripada Filipina sebagai penerima terbesar urutan kedua.

⁴⁶ Sylvia Windya Laksmi dalam Makalah "Pengaruh Kerjasama Keamanan (*Security Cooperation*) Amerika Serikat – Indonesia Terhadap Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme Di Indonesia". Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, 2011 Hal 12

Di tahun 2005 Indonesia menerima sebesar 878.661 ribu dolar AS dana CTFP, 275.000 dolar AS melalui dana NADR-EXBS dan pada tahun 2006 Indonesia menerima dari dana program yang sama sebesar 450.000 dolar AS, Di tahun 2007 Indonesia menerima sebesar 1.180.000 dolar AS, dan tahun 2008 sebesar 465.000 dolar AS.⁴⁷ Lebih dari 30 juta dolar AS telah dialokasikan bagi Indonesia sejak tahun 2002. Unit kepolisian Detasemen 88, unit Kepolisian khusus yang didirikan dengan pengawasan dari pemerintah Amerika Serikat dan dilatih dengan pendanaan dari ATA.⁴⁸

Bantuan pendampingan AS terhadap pemerintah Indonesia difokuskan untuk menanggulangi kemungkinan ancaman terorisme kedepan. AS telah mendonasikan sebesar US\$ 50 juta dalam rangka kontraterorisme di Indonesia pada tahun 2002, dimana US\$ 47 juta digunakan untuk belanja *upgrade* kapabilitas polisi dan US\$ 4 juta untuk training militer.⁴⁹ Departemen Anti Terorisme AS juga telah membantu melatih unit kontraterorisme Indonesia, Densus 88, yang ditujukan untuk penyelidikan yang mengarah pada penangkapan lebih dari 110 tersangka teroris.⁵⁰

Pada tahun 2003, Departemen Pertahanan AS menghabiskan lebih dari US\$ 2,3 juta pada Program Beasiswa Pertahanan Regional Kontraterorisme, pelatihan 78 perwira intelijen Indonesia pada Bahasa Inggris, peningkatan profesionalisme militer, dan kursus yang berhubungan dengan kontraterorisme.

⁴⁷ <http://www.etan.org/news/2007/>. Diakses 14 september 2014

⁴⁸ U.S. Dept. of State, Aug. 2, 2003. <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/12411.htm> diakses 6 Maret 2014

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ "Comprehensive U.S. Program Aids Fight Against Terrorism Abroad," U.S. Dept. of State, <http://usinfo.state.gov/is/Archive/2004/Oct/21-21821.html> 20 Februari 2014

Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan untuk reformasi polisi dan pelatihan telah menjadi fokus utama Kedutaan Besar AS di Jakarta karena pemisahan kelembagaan kepolisian dari militer adalah sebuah konsep yang relatif baru di Indonesia. Pada tahun 2003, Departemen Koordinator Kontraterorisme AS menghabiskan US\$ 8 juta pada program bantuan anti terorisme untuk melatih, melengkapi, dan mengatur unit kontra-terorisme dalam Kepolisian Republik Indonesia. Berikut merupakan tabel bantuan Amerika Serikat - Indonesia :

Tabel 1.4

Bantuan Amerika Serikat Ke Indonesia Tahun 2002-2004

Program	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
Pendampingan Ekonomi			
Kesehatan Anak (CSH)	35.568	32.568	29.250
Bantuan Pengembangan (DA)	38.704	38.704	31.691
Pendanaan Dukungan Ekonomi (ESF)	50.000	60.000	60.000
Pasukan Perdamaian (PC)	-	-	-
PL 480, Title II	5.670	10.245	11.194
Total Bantuan Ekonomi	129.942	141.517	132.135
Bantuan Keamanan **tidak termasuk bantuan kontraterorisme			
Penegakan Hukum dan Penanggulangan Narkotika Internasional (INCLE)	4.000	-	-

Pendidikan dan Pelatihan Militer (IMET)	0.405	0.400	0.600
Pendanaan Pemasaran Militer Asing (FMF)	-	-	-
Non Proliferasi, anti terorisme, (NADR)	8.000	-	-
Total Bantuan Keamanan	12.405	141.917	132.735
Keseluruhan Bantuan	142.347	141.917	132.735

Tabel 2.4

Bantuan Amerika Serikat ke Indonesia Tahun 2005-2009⁵¹

Jenis Bantuan	2005	2006	2007	Estimasi 2008	Alokasi 2009
CSH	37,100	28,017	27,057	25,737	30,883
DA	27,848	33,199	29,524	70,953	122,021
ESF	68,480	69,300	69,300	64,474	-
FMF	-	990	6,175	15,572	15,700
GHAI	-	-	250	-	-
IMET	728	938	1,398	927	1,500
INCLE	-	4,950	4,700	6,150	9,450
NADR	6,262	6,888	8,881	5,861	6,750

⁵¹ Lum, Thomas. 2008. *U.S. Foreign Aid to East and South Asia: Selected Recipients*. CRS Report for Congress hal 18

Total	140,418	144,282	147,321	189,674	186,304
-------	---------	---------	---------	---------	---------

Keterangan:

FMF : *Foreign Military Financing*

IMET : *International Military Education and Training*

INCLE : *International Narcotics Control and Law Enforcement*

NADR : *Non-proliferation, Anti-terrorism, De-mining, and Related Programs*

Total anggaran USAID untuk Indonesia pada tahun 2005 adalah US\$ 102.800.000, dengan lebih dari 10 persen total anggaran didedikasikan untuk kebijakan reformasi dan pelatihan. Besarnya bantuan dan peran AS dan pihak Asing dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, menjadikan lembaga penegak hukum Indonesia dalam bidang bidang pemberantasan terorisme (Densus 88) terbelenggu oleh pesanan dan keinginan pihak Asing. Hal itu nampak dari kelakuan "intimidasi" Densus yang tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri (umat Islam, dan lebih manut kepada keinginan pihak Asing yang memiliki pandangan stigmatisasi Islam sebagai teroris, radikal, dan fundamentalis, yang kemudian berkembang menjadi "teror negara" terhadap dunia pesantren dan masyarakat Islam.

B. Capacity Buildings

Dukungan pelatihan militer terhadap lembaga penegak hukum merupakan strategi yang diterapkan Amerika Serikat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan-serangan teroris di masa depan. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan serangan-serangan di masa depan Amerika Serikat melakukan

Kerjasama dengan Indonesia dibidang pelatihan khusus penanganan terorisme kepada aparat penegak hukum di Indonesia.

Indonesia merupakan penghubung yang cukup penting dalam jaringan pengaturan informal bagi AS untuk dapat menjadi penjamin keamanan terpercaya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan alokasi bantuan IMET untuk pelatihan serta bantuan persenjataan terhadap pemberantasan terorisme di Indonesia. Kerangka kerjasama pertahanan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan persenjataan, Amerika Serikat juga memberikan dana untuk pelatihan personel militer TNI dalam bentuk program *The Global Peace Operations Initiative*(GPOI)/ *Garuda Shield*, *Combating Terrorism Fellowship Program* (CTFP), *Joint Combined Exchange Training*(JCET), dan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT).

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 pemerintah Indonesia telah menetapkan 271 anggota polisi berprestasi untuk mendapatkan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di Indonesia dengan mendatangkan beberapa pelatih dari Amerika Serikat dan juga ada yang dilaksanakan di Amerika Serikat :

1. Pelatihan di Indonesia dengan mendatangkan pelatih dari AS yaitu:
 - a. Riot Control Unit Training
 - b. Senior Leadership Workshop
 - c. Transition to Civilian Policing for Supervisors
 - d. Civil Disturbance Management
 - e. Post Blast Bomb Investigation Course
 - f. Terrorist Crime Scene Investigation Course

2. Pelatihan langsung di Amerika Serikat yaitu :

- a. Hostage Negotiation Course, di New Mexico
- b. Vital Instalation Protection, di Albuquerque;
- c. Post Blast Investigation Course, di New Mexico;
- d. Explosive Diffusion Training, State Police Academy, di Lousiana;
- e. Critical Incident Management training, State Police Academy, di Lousiana.

Pelatihan tersebut adalah Program Pembangunan Kapasitas Bagi Analisis Intelijen dan Pelatihan Kemampuan Teknik Pemberantasan Teroris. Selain itu, pelatihan-pelatihan tersebut yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan para anggota polisi dalam menangani dan memberantas serangan teroris dan kejahatan antar negara, khususnya di Indonesia dan Asia.

Melihat semakin seriusnya masalah terorisme, sesuai dengan kesepakatan AS-Indonesia dalam Memorandum Of Understanding Combating International Terrorism (MOUCIT), maka pemerintah mengirim 9 anggota kepolisian untuk mendapat pelatihan langsung dari FBI dan CIA di AS yang meliputi tim penindak, tim intelijen dan tim penetrasi. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal Detasemen Khusus Anti Teror 88, divisi khusus yang berada dibawah naungan kepolisian yang lebih dikenal Densus.⁵²

Detasemen Khusus 88 Anti Teror, resmi berdiri pada 20 Juni 2003 sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. 30/VI/2003. Hal ini mengacu pada UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁵² Ibid

Undang No.1 Tahun 2002. Densus 88 memiliki tugas mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman hingga penyanderaan, dengan kekuatan personil 400 anggota. Personil yang tergabung dalam Densus 88 merupakan orang-orang pilihan, dan bersifat rahasia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Menurut salah seorang petinggi kepolisian, pembentukan Densus 88 merupakan salah satu upaya sebagai respon terhadap terorisme di Tanah Air atas desakan barat (Amerika Serikat). Densus 88 ini dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U. S Secret Service.⁵³ Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota kusus AS.

Pada tahun 2012, program Bantuan Anti-terorisme dari Departemen Luar Negeri memberikan pelatihan dan peralatan kepada 545 anggota Polri. Para lulusan program ini kini memberikan pelatihan kepada rekan-rekan mereka dalam hal kemampuan menangkal terorisme, seperti tanggap krisis, anjing pelacak (K-9), dan penyelidikan ledakan.

Dana U.S. Foreign Military Financing (FMF) dan International Military Education and Training (IMET) digunakan untuk melatih profesionalisme dan keahlian teknis militer Indonesia, seraya meningkatkan kemampuan operasional secara keseluruhan.

C. Dukungan Diplomasi

Langkah ketiga AS dalam memberantas terorisme di Indonesia yakni memberikan dukungan Diplomasi. Dalam hal ini, AS melakukan kerja sama dengan Indonesia untuk bersama AS memerangi terorisme. Kerjasama bilateral

⁵³ <http://densus88-antiteror.blogspot.com/p/pembiayaan-dan-pelatihan-densus-88.html>. Diakses 22 september 2014

maupun multilateral telah dilakukan oleh AS dengan Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan kerjasama dalam bidang keamanan dengan mengadakan dialog bersama pada tanggal 25 April 2002 di Jakarta. Pada dialog ini telah disepakati antara Indonesia dan AS, sepakat membangun kunci kepercayaan untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas regional. Dari pihak atau delegasi AS sendiri menganggap bahwa dialog ini amatlah penting, dan berjanji bahwa AS akan mencari cara untuk terus dapat membantu Indonesia seperti bekerja untuk memperkuat demokrasi dan melaksanakan reformasi. Masing-masing negara menunjukkan presentasinya, dimana keduanya sepakat bahwa serangan 11 September 2001, merupakan kebutuhan untuk fokus pada upaya bersama dalam melawan terorisme internasional dan ancaman trans-nasional lainnya, selain itu antara AS dan Indonesia saling berbagi pandangan bahwa masih ada konflik regional lama yang perlu dikelola dan diselesaikan secara damai. Pada akhir Dialog I tersebut, kedua delegasi menyatakan bahwa Dialog sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dan menghargai semangat terbuka dan konstruktif yang ditunjukkan oleh seluruh peserta dialog, kemudian, mengambil sebuah kesepakatan bahwa akan mengadakan putaran kedua perundingan resmi pada awal tahun 2003. Dialog II diadakan pada awal tahun 2004, tepatnya pada tanggal 23 April di Washington DC, lanjutan dari pertemuan pertama, pada Dialog II ini pembicaraan lebih meninjau situasi keamanan internasional dan Asia-Pasifik pada waktu itu. Selain itu, membahas upaya masing-masing untuk kontra terhadap aksi

terorisme dan sepakat tentang perlunya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Melalui kerangka kerjasama tersebut, AS berupaya memerangi terorisme di Indonesia. Beberapa kerjasama diantaranya, internasional AS bersama dunia internasional yaitu, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), partnership U.S-Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the ASEAN Regional Forum (ARF) dan the Pacific Islands Forum (PIF). Selain itu kerjasama bilateral dengan negara-negara Sahabat maupun Aliansinya juga telah ditingkatkan.⁵⁴

Dalam kerjasama bilateral pemerintah AS juga memberikan bantuan kepada negara-negara lainnya. Berkaitan dengan hubungan AS-Indonesia dalam rangka kerjasama kontra terorisme, pemerintah AS memberikan bantuan militernya melalui foreign military financing (FMF), international military and education training (IMET), expanded international military and education training (E-IMET), joint military exercise and other activities, dan regional defense counterterrorism fellowship program (CTFP).⁵⁵

Pemerintah AS dengan kebijakan war against terrorism tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan negara-negara lain terutama Indonesia, oleh karena itu perlu bagi AS untuk membentuk suatu aliansi baru agar mendukung kebijakannya.

⁵⁴ <http://www.america.gov>, diakses 20 Juli 2014

⁵⁵ www.etan.org/news . Diakses 18 Mei 2014